

ABSTRAK

Jaminan mempunyai fungsi yang sangat penting dalam kegiatan ekonomi pada umumnya karena dalam pemberian pinjaman modal dari lembaga keuangan (baik bank maupun bukan bank) mensyaratkan adanya suatu jaminan, yang harus dipenuhi kreditur jika ingin mendapatkan pinjaman/tambahan modal (berupa kredit) tersebut baik untuk jangka panjang maupun jangka pendek. Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah lembaga jaminan fidusia.

Fokus penelitian yang akan dianalisa pada tesis ini adalah tentang bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap akta jaminan fidusia yang dibuat oleh notaris di Kota Semarang ? serta kelemahan dan solusi terhadap pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur terhadap akta perjanjian jaminan fidusia yang dibuat oleh Notaris di Kota Semarang.

Perlindungan Hukum Terhadap Akta Jaminan Fidusia Yang Dibuat Oleh Notaris Di Kota Semarang dapat dilihat dari Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, bahwa notaris adalah pejabat umum, berwenang membuat akta, autentik, ditentukan oleh undang-undang. Fidusia memberikan syarat bahwa perlindungan hukum atas benda objek jaminan fidusia muncul setelah didaftarkan secara online dengan bukti sertifikat fidusia yang dikeluarkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Kelemahan-kelemahan dalam pelaksanaan perlindungan hukum bagi kreditur pada suatu perjanjian fidusia antara lain adalah, Jaminan fidusia yang tidak dibuatkan sertifikat jaminan fidusia menimbulkan akibat hukum yang kompleks dan beresiko. Kreditur bisa melakukan hak eksekusinya karena dianggap sepihak dan dapat menimbulkan kesewenang-wenangan dari kreditur. Selain itu Kreditur pun dapat dirugikan dengan ketidak pastian jaminan fidusia tersebut diantaranya adalah kemungkinan terjadi tindak pidana penipuan, penggelapan terhadap barang jaminan fidusia selama barang tersebut masih di tangan Debitur. Hal ini akibat lemahnya aturan yang ada dalam UUJF sampai hari ini.

Pada akhirnya dari penelitian ini disimpulkan bahwa pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia sangat berguna untuk melindungi hak kreditur maupun debitur. Sangat diwajibkan bagi kreditur untuk melakukan pendaftaran Fidusia baik secara langsung maupun melalui Notaris guna memberikan kekuatan hukum bagi para pihak. Selain itu kelemahan yang terdapat dalam UUJF harus segera di perbaharui dengan diadakan amandemen terhadap Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Hal ini demi memperkuat kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia, Akta Notaris

ABSTRACT

Guarantees have a very important function in economic activities in general because in lending capital from financial institutions (both banks and non-banks) requires a guarantee, which must be met by creditors if you want to get a loan / additional capital (in the form of credit) is good for the term long or short term. One of the known guarantee institutions in the legal guarantee system in Indonesia is the fiduciary guarantee agency. At this time the practice of fiduciary security is still very far from expected, many finance companies are reluctant to register for fiduciary guarantee, because it only uses fiduciary deed made by Notary only.

The research focus that will be analyzed in this thesis is about how the implementation of legal protection against fiduciary guarantee certificate made by notary in Semarang? as well as weaknesses and solutions to the implementation of legal protection for creditors against fiduciary guarantee agreement made by Notary in Semarang?.

Legal Protection Against Deed of Fiduciary Guarantee Made by Notary In Semarang City can be seen from Article 1 of the Notary Law, that a notary is a public official, authorized to make deed, authentic, determined by law. Fiducia provides that the legal protection of a fiduciary object object appears after being registered online with proof of a fiduciary certificate issued by the Ministry of Justice and Human Rights. The weaknesses in the implementation of legal protection for creditors in a fiduciary agreement among others are, fiduciary security which is not made fiduciary guarantee certificate gives rise to complex and risky legal consequences. The creditor can exercise his / her right of execution because it is considered unilateral and may lead to arbitrariness of the creditor. Such actions may be categorized as Legal Acts (PMH) as stipulated in Article 1365 of the Civil Code and may be claimed for damages by the debtor.

In the end of this study concluded that the implementation of fiduciary guarantee agreement is very useful to protect the rights of creditors and debtors. It is urgently required for creditors to register Fiduciary either directly or through a Notary to provide legal force to the parties.

Keywords: Legal Protection, Fiduciary Guarantee, Notary Deed